

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN JEMBER DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT DI KECAMATAN BALUNG

Ferdyan Helmy Angga Wijaya  
Program Studi Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata no. 49 Jember  
E-Mail: [anggawijaya174@gmail.com](mailto:anggawijaya174@gmail.com)

**ABSTRACT**

This research focuses on the Implementation of the Regional Government Policy of Jember Regency in public health services in the District of Balung where the Regional Government of Jember Regency has a duty as a health service provider. This study aims to determine whether the public health service policy that is the authority of the Regional Government of Jember Regency can be well organized to the community, so as to achieve the goal in hopes of providing excellent service to the community.

This study uses qualitative methods, the results of this study indicate that public perceptions of the performance of local governments on health services are good. the benefits of the health care policy have also begun to be felt by the community. However, there are several obstacles and factors that become obstacles and supporters of the implementation of the Jember district government policy towards public health services in Balung District

**ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung dimana Pemerintah daerah Kabupaten Jember memiliki tugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat diselenggarakan dengan baik kepada masyarakat, sehingga mencapai tujuan dengan harapan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Tingkat Keberhasilan suatu kebijakan diukur dengan kinerja dari Kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan sudah baik. manfaat dari kebijakan pelayanan kesehatan tersebut juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala dan faktor –faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dari Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung .

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pelayanan kesehatan Masyarakat  
Pemerintah Daerah

---

## PENDAHULUAN

---

Di era reformasi kata perubahan menjadi kata yang sering disuarakan, baik untuk individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur birokrasi menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi, selalu mengeluh dan kecewa terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayannya.

Paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang disediakan aparatur pemerintah kepada masyarakat mulai dari urusan kelahiran sampai urusan kematian. Semua jenis pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Salah satu yang menjadi point utama adalah pelayanan publik yang dinilai masih minim dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa, terutama pada daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah berkembang. Dalam pelayanan kesehatan Masyarakat, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan serta biaya yang relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Terdapat tiga unsur pokok dari pelayan itu sendiri. Pertama, biaya harus relatif lebih rendah, kedua waktu yang diperlukan dan terakhir mutu pelayanan yang diberikan harus relatif baik.

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kebijakan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat yaitu peningkatan manajemen pelayanan kepada masyarakat yang berbasis kemasyarakatan, memberikan jaminan kesehatan terpadu bagi masyarakat desa, dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga medis yang dinilai mampu memberikan segala bentuk tindakan yang sesuai kemampuan mereka, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mendukung terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan Kabupaten Jember merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dan pembangunan Nasional. Perlu diakui keberhasilan pembangunan kesehatan selama ini masih meninggalkan akses-akses sampingan berupa keadaan lingkungan yang kurang stabil, perencanaan pembangunan yang kurang ditopang oleh analisa dampak lingkungan serta tindak lanjut implementasi yang kurang cermat sehingga dikhawatirkan kesemuanya itu menjadi pokok permasalahan yang dapat mengganggu kualitas lingkungan masyarakat.

Maka dari itu, dalam tujuan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Jember dan dibantu oleh pemerintah kecamatan setempat serta pihak-pihak terkait dan masyarakat yang ikut berpartisipasi berswasembada dibidang kesehatan, diharapkan mampu dalam pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Balung. Pencapaian tujuan tersebut harus disertai dengan keinginan pemerintah daerah Jember untuk membangun tingkat

pelayanan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan memperhatikan masalah yang sangat berpengaruh dalam proses peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa yaitu memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, dan menyediakan Sumber Daya Manusia(SDM) khususnya tenaga medis yang dinilai mampu untuk bekerja dengan baik, serta sarana dan prasarana sebagai aspek pendukung tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat desa yang baik dan profesional

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi dan penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan Balung ?
2. Apa saja yang menjadi Faktor Pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan Balung?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan Balung
2. Mengetahui faktor-faktor yang Pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan Balung

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kebijakan**

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan Kebijakan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah di tetapkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diambil.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan.keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur dan mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian pengambilan kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan instansi pelaksana

### **Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam ayat 3, UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal ini di maksudkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

## **Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kaitannya dengan Standar Pelayanan Publik**

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

### **Sasaran Pelayanan Publik**

Sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja, yaitu kepuasan. Meskipun sasaran itu sederhana tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur dengan pasti, paling hanya dapat dikenali dari beberapa sudut

### **Konsep Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karenanya ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan secara rutin dan berkesinambungan orang dalam masyarakat. "pelayanan merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha baik melalui aktivitas sendiri, maupun secara langsung melalui aktivitas orang lain, aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa

### **Standar Pelayanan Minimal**

Standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oentarto, et all.

"standar pelayanan minimal memiliki nilai yang strategis baik bagi pemerintahan pusat (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen)". (2004:173) Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada

---

## **METODE PENELITIAN**

---

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Aspek yang akan menjadi fokus penelitian adalah mengenai upaya yang dilakukan berupa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan- kesehatan masyarakat desa, serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dan yang menjadi titik fokus yaitu seluruh fasilitas kesehatan di kecamatan. Kecamatan Balung yaitu Puskesmas, Polindes, dan Rumah Sakit Umum daerah yang dipilih secara sengaja dengan dasar pertimbangan bahwa Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berlaku di seluruh fasilitas kesehatan tersebut

### **Fokus Penelitian**

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Jember
- 2) Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan
- 3) Kepala Bagian Pengembangan SDM
- 4) Kepala Puskesmas Kecamatan Balung
- 5) Bidan Polindes Kecamatan Balung
- 6) 10 orang Masyarakat yang Tersebar di Kecamatan Balung

### **Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian peneliti mendapatkan data melalui data primer dan data sekunder

### **Teknik Pemilihan Informan**

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitain ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan bentuk wawancara semi terstruktur

### **Metode Analisis Data**

Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap *display* data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

---

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

### **Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih dua bulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan beberapa narasumber/informan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dilengkapi dengan dokumentasi, maka peneliti berhasil memperoleh data yang berhubungan masalah yang diteliti. Dalam implementasi kebijakan tersebut, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi jalannya program Jaminan Kesehatan Daerah. beberapa Problem yang dihadapi dianalisis terkait kurang maksimalnya jenis pelayanan yang diberikan oleh pelayan kesehatan, disposisi atau sikap yang diberikan pelayan kesehatan yang

dianggap sebagian masyarakat kurang baik, ketersediaan tenaga kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, serta masalah-masalah lain yang akan di bahas selanjutnya

### **Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Jember**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan ini menjadi Landasan Pemerintah Jember dalam mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Sasaran Utama dalam Peningkatan Pelayanan tersebut adalah masyarakat miskin yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan yang Layak.

Tujuan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dijamin pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah meningkatkan cakupan masyarakat miskin yang belum memiliki atau terjaring jaminan kesehatan nasional di kabupaten Jember untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit Daerah Kabupaten maupun di Rumah sakit Rujukan Tersier/ Rumah Sakit Provinsi, menggunakan yang namanya surat pernyataan miskin dan kartu jamkesda

Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dimaksud disini adalah jaminan masyarakat miskin yang dimana para masyarakat betul-betul

miskin tapi belum memiliki jaminan kesehatan.

## **2.Reiliability (Pemberian Pelayanan yang tepat dan benar)**

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini merupakan proses untuk menuju tujuan tersebut dalam proses pelayanan secara rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat.yang tepat dan benar).

Untuk itu perubahan akan manajemen pelayanan kesehatan perlu dilakukan jika rasa puas masyarakat akan suatu pelayanan kesehatan yang baik belum terwujud.Pelayanan kesehatan gratis

melalui Sistem Jaminan Kesehatan Daerah memulai proses perubahan dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

### **Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan(Empaty)**

Respon Informan mengenai adanya program pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan beberapa Fasilitas Kesehatan di wilayah Kecamatan Balung beragam, ada yang mengatakan lumayan baik, tetapi ada juga masyarakat yang menganggap masih kurang baik.Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh fakta sementara bahwa masyarakat dalam merespon adanya Program Pelayanan Kesehatan gratis adalah sangat baik, tetapi tidak dipungkiri, terdapat sbegaiian masyarakat yang kurang puas dengan jenis pelayanan yang disediakan

### **Sistim Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat(Responsivines)**

Salah satu syarat terwujudnya suatu pelayanan kesehatan masyarakat yang baik yaitu efisiennya biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam menunjang kebutuhan untuk memperoleh kesehatan.

### **Etika dan Moral Petugas dalam Memberikan PelayananKesehatan**

Kesehatan merupakan bagian yang terpenting dalam memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap masyarakat.Assurance berhubungan

dengan sikap/disposisi yang ditunjukkan oleh pelayan kesehatan kepada masyarakat.Jika sikap/disposisi yang ditunjukkan oleh pelayan kesehatan baik, maka masyarakat akan merasa puas dengan segala bentuk pelayanan yang diberikan, begitupun sebaliknya.

Namun fakta lapangan membuktikan, terdapat beberapa orang yang beranggapan bahwa proses pelayanan kesehatan masih sama adanya sebelum di berlakukannya Jamkesda dipengaruhi oleh sikap/disposisi dan tingkah laku pemberi pelayanan kesehatan yang kurang ramah ketika mereka.

### **Kualitas dan Kuantitas pelayanankesehatan**

Kualitas dan Kuantitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Balung dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan suatu pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan. Akan tetapi terlepas dari layaknya fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai, perlu lagi adanya peningkatan pada kedua kebutuhan masyarakat tersebut kaitannya dengan proses pelayanan kesehatan yang berjangka panjang.

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di kecamatan Balung hanya berkisar pada kurangnya kesadaran masyarakat yang ketika datang berobat yang lupa membawa persyaratan untuk melengkapi administrasi, kurangnya disposisi/tingkah laku yang baik yang harus diberikan olehpetugas pelayanan kesehatan, kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang mampu melengkapi kekurangan di berbagaiwilayah.

## **Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

### **Pelayanan kesehatan**

Kebijakan Jaminan Kesehatan salah satu bagian yang terpenting untuk menciptakan masyarakat yang terlepas dari belenggunya ketidakberdayaan, dimana akses kesehatan yang sangat sulit terkadang membuat masyarakat rela dalam kesakitan, kesehatan telah menjadikan masalah tersendiri dalam masyarakat yang telah lama berusaha untuk dihilangkan. Implementasi sebuah kebijakan akan didukung oleh berbagai faktor, begitupun dengan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana pengaruh faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung.

#### **a. Kondisi Lingkungan**

##### **Pelayanan Kesehatan**

Faktor lingkungan merupakan faktor selanjutnya dalam menilai kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Balung. Seperti yang telah diketahui, lingkungan merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD, puskesmas maupun balai-balai pengobatan yang ada di kecamatan Balung.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian implementor program

Dalam implementasi suatu kebijakan tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya kebijakan dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Aspek sumber daya ini

merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh

Oleh karena itu ketersediaan pelaksanaan yang cukup berkompetensi dalam mendorong keberhasilan kebijakan tersebut. Seperti diketahui terdapat beberapa kasus yang sebelumnya telah di paparkan oleh peneliti. Untuk melihat kembali kenyataan yang di paparkan, kondisi ketenagaan atau tenaga kesehatan yang ada seluruh fasilitas kesehatan di Kecamatan Balung masih kurang maksimal dari apa yang diharapkan

#### **c. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan**

Selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program peneliti melihat kurangnya sarana dan prasarana kesehatan memungkinkan terjadinya suatu manajemen pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang baik.

---

## **KSIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jember terkait kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang baik, dan menyeluruh terhadap masyarakat. Beberapa kebijakan seperti Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan kebijakan tentang pengeporesian Standar Pelayanan Minimal serta kebijakan lain seperti penggunaan SPM yang kesemuanya telah berjalan.

- a. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab. Jember yang bertujuan untuk memudahkan setiap warga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Wilayah Kab. Jember .
- b. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah tertuang dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya pelayanan kesehatan
- c. Program jaminan kesehatan daerah adalah program yang dimuat didalam Peraturan Bupati Jember untuk masyarakat miskin dengan dibuktikanya kartu Jamkesda dan SPM (surat pernyataan miskin). Kartu jamkesda adalah bentuk jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten sedangkan SPM adalah bentuk jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten dimana masyarakat miskin yang masih belum terkover oleh jaminan kesehatan apapun yang ada di Kabupaten Jember.
- d. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam Peraturan Bupati Jember No 8 Tahun 2015 untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kabupaten Jember terdapat pengaruh faktor partisipasi, lingkungan, sumber daya serta disposisi/sikap. Di mana yang paling berpengaruh adalah Sumber daya yaitu tenaga kesehatan dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan yang dinilai belum terlalu memadai. Selain itu faktor disposisi/sikap pelayan

kesehatan yang dinilai sebagian masyarakat masih kurang atau jauh dari angka lumayan baik

### Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian masih memerlukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, sehingga dapat memenuhi syarat untuk dijadikan literatur kajian pustaka. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya tetap mempertahankan kebijakan SPM bagi masyarakat miskin, karna masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Jember yang belum terdata, terkover oleh jaminan pelayanan yang ada dan membutuhkan pengobatan. Apabila ada jaminan kesehatan yang baru maka, sebaiknya pendataan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jember harus adanya sinkronisasi dari Badan Pusat Statistik hal ini dimaksudkan agar hasil pendataan tersebut dapat mendata seluruh masyarakat miskin yang ada dan benar – benar tepat sasaran.
2. Dinas Kesehatan Jember sebaiknya memuktakhirkan kelengkapan fasilitas medis di Rumah Sakit Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Selatan harus tetap membina dokter, perawat dan bidan serta aparat pelayan kesehatan lainnya dari segi sikap dalam melayanipasien.
3. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember agar mengatasi masalah terkait keberadaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap masih kurang dan belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai. Seperti penambahan jumlah dokter,

perawat, bidan serta petugas kesehatan lainnyadan pengadaan Puskesmas Pembantu di beberapa desa yang dianggap jauh dari kecamatan masing-masing.

masyarakat.Universitas Muhammadiyah Jember.

#### Undang Undang :

1. UUD Republik Indonesia
2. UU RI no 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2006-2025
3. UU RI no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU RI no 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan
5. UU RI no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standard Pelayanan minimal Bidang kesehatan Kabupaten / kota.
7. PERDA no 1 tahun 2016 Tentang system Kesehatan Provinsi dan PERDA no 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan

#### Situs :

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pada jam 20.20 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS). “ Kecamatan Balung Dalam Angka 2015 ”. Katalog BPS 1102001.3509130 diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pada jam 19.37 WIB

---

### DAFTAR PUSTAKA

---

- BAPEDA.*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten JemberTahun 2016-2017*. BAPEDA kabupaten Jember
- Budiman,Rusli.2004.*Pelayanan public di Era Reformasi*.Jakarta.
- Burhan,Bungin.2001.*Metode Penelitian Sosial Format Format Kuantitatif dan Kualitatif*.Universitas Airlangga Press:Surabaya.
- Fanar,Syukri.2010.*Standard Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kreasi Wacana: Tanggerang Banten*.
- Nugroho,D.Riant.2008.*Kebijakan Publik untuk negara negara berkembang* PT Alex Media Komputindo:Jakarta.
- Subarsono,A.G.2005.*Analisis Kebijakan Publik:Konsep,Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar:Yogyakarta
- Sugiono.2008.*Metode penelitan kuantitaif dan kualitatif R&D*.Alfabeta:Bandung
- Suharto,Edi.2008.*Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*.Alfabeta:Bandung.
- Widodo,Joko.*Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno,Budi.2002.*Kebijakan Publik:Teori dan Proses*.Media Pressindo:Yogyakarta.
- Abdurahman,2012.*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah Halmahera Selatan*.Universitas Hasanudin:Makasar.
- Wulandari,Ekamaulana.2012.*Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan*

